

MASALAH PERBATASAN DI ASIA TENGGARA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH: Pengalaman Indonesia di Kalimantan Timur¹

I Ketut Ardhana
Pusat Penelitian Sumber daya Regional LIPI
phejepsdrlipi@yahoo.com

Abstrak

Tiap-tiap negara masih mempunyai cara pandang yang berbeda dalam mengelola wilayah perbatasannya terutama paska-kemerdekaan negara-negara di Asia Tenggara. Di satu pihak masih ada yang menganggap bahwa perbatasan adalah daerah yang tertinggal dan jauh dari pengaruh modernisasi. Di pihak yang lain ada anggapan bahwa mereka perlu mengubah pandangan itu dengan menjadikannya sebagai daerah pintu depan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Hal ini tidak dapat terlepas dari persoalan masa lalu, yang melihat bahwa pusat lebih penting dari daerah pinggiran.

Akan tetapi, wacana yang berkembang akhir-akhir ini nampaknya mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari perubahan pendekatan pertahanan dan keamanan menuju pendekatan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana pentingnya persoalan perbatasan ini, tidak hanya dari sudut pandang kedaulatan negara dan formasi negara bangsa, tetapi juga dari perspektif peningkatan ekonomi lokal dan regional, serta masalah globalisasi yang sedang berlangsung.

I. Pendahuluan

Migrasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan salah satu catatan fenomena sejarah yang paling awal.² Penduduk di sekitarnya melakukan migrasi ke wilayah perbatasan karena wilayah perbatasan dianggap sebagai “magnet” yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka bertemu dan berpisah kemudian bergerak ke tempat lainnya sesuai dengan kepentingannya. Masyarakat lokal yang hidup di wilayah perbatasan di Asia Tenggara misalnya sebenarnya memiliki kelompok etnis yang sama sebelumnya--dalam kaitannya dengan persoalan identitas nasional-- menjadi berbeda berdasarkan kewarganegaraan ketika berdirinya negara-negara modern.³ Pada saat terbentuknya negara-negara modern di Asia Tenggara, mereka tidak lagi bersatu berdasarkan kesamaan etnisitas dan identitas, melainkan sudah menentukan dirinya berdasarkan identitas kewarganegaraan negara modern yang terbentuk itu.

Demikian pula halnya seperti yang terjadi di Kamboja dan Thailand, yaitu orang Kamboja di perbatasan itu pada awalnya yang berasal dari etnis yang sama dan hidup secara berdampingan, namun setelah terciptanya negara modern, mereka lalu terpisah secara politik,

¹ Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sejarah VIII pada Sub Tema: “Perbatasan dalam Pemikiran/ Sikap Kultural, Keputusan Politik dan Letupan Peristiwa” di Jakarta pada tanggal 13-17 November 2006.

² Eufrecina Mae P. Barros, “Ministers on the Move: Current Issues and Trends in Religion and Migration”, dalam *Southeast Asia A Global Crossroads* (SEASREP 10th Anniversary Conference 8-9 December 2005. Chiang Mai-Thailand).

³ David Chandler, *A History of Cambodia: Politics, War and Revolution Since 1945* (Bangkok: Silkworm Books, 2003).

meskipun secara sosial budaya dan ekonomi saling membutuhkan. Hal ini tercermin dari aktifitas perdagangan di wilayah perbatasan, yang diwarnai oleh mobilitas manusia dan barang yang cukup tinggi dari pagi hari hingga malam hari.⁴ Di samping menggambarkan adanya tingkat aktifitas ekonomi yang tinggi, kondisi di perbatasan juga tidak terlepas dari dampak negatif dari pengaruh globalisasi seperti proses migrasi ilegal (*undocumented movement*), *trafficking*, *smuggling*, dan perdagangan rahasia lainnya, separatisme di Asia Tenggara yang semakin meningkat.⁵ Untuk Gerakan separatis Lahu yang dibentuk pada tahun 1972 dalam suatu wadah yang dibentuk *the Lahu National United Party* (LNUP) telah melakukan gerakannya di perbatasan Thailand. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai pendukung 1000 orang di bawah pimpinan tentara yang terpusat di pegunungan Mong Hsat.⁶ Demikian pula dengan kondisi di perbatasan lainnya di Asia Tenggara, baik di wilayah daratan maupun dunia kepulauannya telah menunjukkan kondisi yang hampir sama. Dapat dikatakan bahwa masalah perbatasan sama sekali tidak terlepas dari arena konflik, meskipun negara modern telah menciptakan nuansa perdamaian, ketergantungan ekonomi dan sekaligus kompetisi dan kerjasama regional dalam upaya mendinamiskan wilayah perbatasan itu.⁷

Bagi masyarakat yang hidup di perbatasan yang terpencil, seringkali mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah tidak sama dengan etnis yang dulu adalah kerabatnya sendiri. Terlebih-lebih kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah memiliki identitas nasional yang berbeda. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula mengapa di beberapa tempat tidak menghiraukan, kalau tanah-tanah yang dimiliki mereka itu sebenarnya sudah berada di wilayah negara lain, yang padahal menurut sepengetahuan mereka dulu wilayah itu masih menjadi milik nenek moyang mereka. Akan tetapi, karena berdasarkan kesepakatan antar negara kolonial di masa yang lalu, maka penduduk di wilayah itu memiliki identitas nasional yang berbeda dan berada di wilayah negara lain. Tulisan ini membahas bagaimana persoalan perbatasan di Asia Tenggara dewasa ini, bagaimana upaya masing-masing negara yang berbatasan itu mencoba mengatasi persoalan konflik karena tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan bagaimana prospek perkembangan perbatasan di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Dengan kajian terhadap permasalahan ini diharapkan akan dapat memahami bagaimana persepsi mereka terhadap persoalan-persoalan perbatasan di Asia Tenggara dan langkah-langkah

⁴ I Ketut Ardhana, "Politik dan Strategi Perbatasan", dalam *Komunika (Warta Ilmiah Populer Komunikasi dalam Pembangunan)*, Vol. 9, No. 1 (Jakarta: LIPI Press, 2006). I Ketut Ardhana, Jayl Langub dan Daniel Chew, "Border of Kinship and Ethnicity: Cross-Border Relation between the Kelalan Valley, Sarawak and the Bawan Valley East Kalimantan", dalam *Borneo Research Bulletin*, Vol. 35, 2004b), hal. 144-179. Lihat juga: "Border of Kinship and Ethnicity: Cross-Border Relations between the Kelalan Valley, Sarawak, and the Bawa Valley, East Kalimantan", dalam *Borneo Research Bulletin*, Vol. 35. Helsinki-Finlandia: University of Helsinki, 2004c.

⁵ Lihat: Eric Tagliacozzo, "Border Permeability and the State in Southeast Asia: Contraband and Regional Security", dalam *Contemporary Southeast Asia*, Volume 23, No. 2, (August 2001), hal. 260. Lihat juga: M. Djuhari Wirakartakusumah dan Akhmad Yani, "Borderless Migration: Impact to HIV/ AIDS Infection and Transmission: Indonesian Case". (Makalah). Cf. Rodney Tasker, "The Borders of Suspicion", dalam *The Far Eastern Economic Review*, Oktober 1982), hal. 13.

⁶ Sebagaimana halnya dengan etnik Lahu, etnik Shan dan Karen juga mempunyai gerakan untuk memperjuangkan kepentingannya seperti adanya *the Shan State Progress Party*, *the Karenni National Progressive Party*, lihat: Sheldon A. Jacobs, *Myanmar: Trade and Investment in Asia (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: Studies in Trade and Investment)*, (New York: the United Nations, 1996), hal. 344-347.

⁷ John Haba, "Ethnic Groups, Development and Potential Conflict: Case Study in Nunukan's District", dalam *BRC Conference 2002*. Kinabalu, 15-18 Juli 2002.

kerjasama yang telah dilakukannya dalam mengubah kesan bahwa daerah perbatasan di Asia Tenggara sebenarnya merupakan media dialog ke arah perkembangan zona perkembangan ekonomi di tingkat regional.

II. Perbatasan di Asia Tenggara: Perspektif Historis

Di masa lalu terdapat persepsi yang berbeda dalam menangani permasalahan perbatasan di Asia Tenggara. Hubungan perbatasan antara Thailand dan Birma misalnya yang tidak hanya memiliki garis perbatasan yang panjang, tetapi juga sejarah yang menarik dan nilai-nilai budaya yang dapat dilacak kembali di abad-abad yang lalu. Namun demikian diakui bahwa masih sangat terbatas adanya karya akademik yang sudah dilakukan di daerah pertukaran budaya itu.⁸ Kedua bangsa telah terlibat dalam kemakmuran regional selama berabad-abad namun demikian penduduk lokal di kedua daerah perbatasan di pegunungan Tenasserim, Thailand dan Birma telah diuntungkan dari adanya pertukaran sosial dan budaya itu. Sastra sejarah yang berasal dari Myanmar, telah ditemukan karakternya juga yang masuk ke sekolah-sekolah dengan gaya Thailand, permainan dan seri televisi. Misalnya sebuah contoh yang baik untuk ini adalah sastra klasik Mon-Myanmar yang berjudul Rajadhirat. Pertukaran budaya terjadi pula di era kolonial secara menarik dapat dilihat adanya sejumlah karya-karya sejarah dan novel tentang kejatuhan dinasti Konbaung yang ditulis dan disebar di Thailand sejak pemerintahan raja Rama V seabad yang lalu.⁹

Namun demikian, di satu pihak memang ada hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat di perbatasan, akan tetapi di lain pihak muncul konflik di wilayah perbatasan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, misalnya saja bahwa di masa lalu Birma yang sekarang lebih dikenal dengan Myanmar pernah menganeksasi ke Thailand yaitu ke Ayutthaya. Sunait Chutintaranond (2001: 30-31) mencatat bahwa menurut kronik Myanmar tentara Tabinshwehti terdiri dari 480 gajah perang, 24000 pasukan kavaleri, dan 120.000 infantri.¹⁰ Pada saat itu raja juga meminta bantuan seorang prajuri upahan Portugis, Diogo Soares de Mello dengan memberinya 180 senjata. Dikatakan ini adalah saat pertama kali dalam sejarah militer Myanmar seorang raja dengan kekuatan yang besar menyeberang sungai Salween untuk menaklukkan kerajaan Thai di lembah Chao Phraya yang berlokasi beberapa ratus kilometer dari ibu kota kerajaan Myanmar di lembah Irrawaddy. Ketika berkecamuknya perang, orang Birma dikatakan telah membakar Ayutthata dan bahkan telah merampas beberapa Budha yang dibawa lari ke Birma. Namun setelah menaklukkan Ayudhya Thailand selama sebulan akhirnya Tabinshwehti menarik pasukannya yang terluka dalam perang itu. Hal ini tentu bagi masyarakat Thailand dapat memaafkannya, namun tidak pernah dapat

⁸ Upaya mengkaji pengaruh-pengaruh luar, khususnya Cina terhadap negeri-negeri di Asia Tenggara dapat dibaca: Grant Evans, Christopher Hutton dan Kuah Khun Eng (eds.), *Where China Meets Southeast Asia: Social & Cultural Change in the Border Regions* (Singapore-Bangkok: White Lotus and Institute of Southeast Asian Studies, 2000). Cf. I Ketut Ardhana, "Some Notes on Border Issues between Thailand and Burma", dalam I Ketut Ardhana, Lamijo, Yekti Maunati, Rucianawati (et al.). *Trade Contacts in the Cross-Border Areas between Thailand and Burma 1900-2002* (Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences, 2004a).

⁹ Sunait Chutintaranond dan Kanokphan U-sha, *From Fact to Fiction: History of Thai – Myanmar Relations in Cultural Context: Historical Conference* (Bangkok: Institute of Asian Studies & Faculty of Arts Chulalongkorn University, April 2001).

¹⁰ Setelah Mintaya Shwehti atau Tabinshwehti, raja pertama dinasti Toungoo (1539-1599) yang berhasil menyatukan Myanmar setelah kejatuhan kerajaan Pagan pada tahun 1287, maka ia melancarkan perang ke negeri tetangganya Thailand pada tahun 1548. *Ibid.*, hal. 30-31.

melupakannya. Hingga dewasa ini Birma oleh Thailand masih dianggap sebagai “ancaman” yang suatu saat di masa depan dapat saja peristiwa seperti itu terulang kembali. Pengalaman “pahit” yang dirasakan oleh Thailand tentu berusaha diubah menjadi hubungan antar dua negara yang tidak hanya menyimpan potensi konflik tetapi dicoba dirubahnya menjadi potensi yang mengandung nilai-nilai harmoni. Bahkan, di kalangan mereka pun sadar bahwa presentasi mereka sekarang ini sebenarnya sebagai suku yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan kekerabatan. Inilah potensi yang sebenarnya dapat dikembangkannya karena melalui hubungan kekerabatan ini akhirnya hubungan perekonomian dalam kaitannya dengan aktifitas perdagangan dapat dikembangkannya di wilayah perbatasan.

Benedict Anderson (1983) dalam bukunya *Imagine Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* mencatat bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap wilayah perbatasan antara negara modern dan tradisional. Di Asia Tenggara negara tradisional ditentukan oleh pusatnya dan bukan oleh wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pemerintahan negara-negara itu memberikan perhatian kepada pusat pemerintahannya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang dianggap jauh dari jangkauan pusat. Ini pula yang menyebabkan mengapa penduduk di wilayah perbatasan yang dianggap sebagai kelompok minoritas seringkali merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kategori “*hill tribe*” dikonstruksikan di Thailand antara tahun 1950-an dan 1960-an dalam kurun waktu ketika persoalan keamanan menjadi permasalahan penting di perbatasan antara Thailand dan Birma. Selama ini memang terdapat banyak kelompok minoritas di daerah pegunungan utara Thailand. Mereka menginginkan diperlakukan sebagai kelompok yang diakui eksistensi dalam kaitannya dengan identitas mereka sendiri. Namun sebaliknya dilihat dari perspektif pemerintah Thailand, adanya proses pergerakan dari kelompok minoritas itu ke wilayah perbatasan seringkali dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara.¹¹

Wilson (1985) mencatat bahwa satu dari persoalan primer dalam sejarah daratan Asia Tenggara adalah persoalan kontrol terhadap daerah pegunungan di perbatasan bagian utara Thailand (*the Shan Plateau*) hingga mencapai sungai Salween. Daerah ini dihuni secara relatif oleh kelompok kecil seperti orang Karen, Shan dan kelompok etnis lainnya.¹² Sepanjang sejarahnya mereka hidup tidak dalam keadaan yang mudah dengan kelompok penduduk lainnya di perbatasan Thailand dan Birma. Kedua negara berusaha mencari secara berulang-ulang tentang otoritas mengenai dataran tinggi Shan dan mereka menggunakan wilayah itu sebagai posisi strategis untuk menyerang wilayah Thailand.¹³ Serangan tentara Birma yang berulang-ulang ini mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat di Thailand bagian Utara untuk

¹¹ Mika Toyota, “Who are the ‘illegal migrants’ at the Thai-Myanmar border?”, dalam *2nd SEASREP Workshop on Borders and Borderlands in Southeast Asia, 25-26 March 2004*, Jakarta-Indonesia., hal. 1.

¹² Mengenai agama yang dianut orang Karen dapat dikatakan bahwa seperenam diantara mereka penganut Kristen, sementara kebanyakan diantaranya adalah penganut Budha, lihat: Martin Smith, *Burma: Insurgency and the Politics of Ethnicity* (London: Zed Books Ltd., 1999), hal. 44.

¹³ Pada tahun 1765 tentara Birma mengirim tentara ke dalam tiga kelompok ke Thailand. Satu kelompok melalui Chiang Mai, kelompok kedua melalui Three Pagoda Pass, dan kelompok ketiga melalui Tenasserim. Setelah kemenangan dalam waktu lima belas bulan, ibu kota Ayudhya jatuh ke tangan Birma. Selanjutnya dibuatlah rekonstruksi ibu kota yang baru, Bangkok, yang sebetulnya pada masa kekuasaan Rama I (1782-1809) belumlah selesai dibangun. Lihat lebih lanjut: Constance M Wilson dan Lucien M. Hanks, “Thai-Shan Diplomacy in the 1840’s”, dalam *The Burma-Thailand Frontier over Sixteenth Decades: Three Descriptive Documents*. (Athens & Ohio: Center for International Studies, Monograph in International Studies Southeast Asia series, No. 70, 1985).

mendirikan kembali kerajaan mereka yang menempatkan kembali pada batas-batas sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan kelompok etnik minoritas, di perbatasan antara Thailand dan Myanmar terdapat kelompok minoritas “tentara Wa”. Mereka seperti warrior yang hidup di perbatasan Myanmar. Jumlah mereka tidaklah banyak dan kurang dari total orang Karen atau kelompok etnik Shan. Hingga kini mereka memainkan peranan penting dalam perannya yang masih tampak pada persoalan perbatasan antara Myanmar dan Thailand yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan juga masalah perdagangan illegal. Hal ini dapat dilihat pada gerakan “tentara Wa” yang pada dasarnya tidak memiliki eksistensi yang jelas berkaitan dengan masalah kewarganegaraannya, yang mempunyai aktifitas dalam perdagangan candu, heroin dan senjata illegal.¹⁴ Kelompok Wa ini dipercaya telah dimanipulasi oleh orang-orang Cina dalam kaitannya dengan bisnis illegal seperti dalam masalah penjualan senjata illegal. Kelompok etnik Wa ini dipergunakan sebagai benteng (*buffer*) orang Myanmar yang didukung secara kuat oleh orang Cina yang mendiami wilayah bagian Cina Selatan atau Yunnan.¹⁵ Oleh karena itu, kehadiran kelompok etnik Wa dipertimbangkan juga sebagai perantara (*broker*) yang melindungi perdagangan illegal di wilayah perbatasan antara Thailand dan Myanmar.

Selain gangguan kelompok etnik Wa, pemerintah Thailand mempunyai masalah juga dengan kelompok etnik minoritas lainnya seperti Shan, Karen atau yang lainnya yang mendiami pegunungan bagian utara Thailand. Pemerintah Thailand pun menginginkan mereka sebagai kelompok minoritas namun tetap sebagai bangsa Thai. Mereka dilindungi oleh pemerintah, namun untuk menghindari kebiasaan lama mereka yang menanam tanaman candu, pemerintah lalu memberikan pelatihan-pelatihan seperti membuat barang-barang kerajinan keramik. Ada pun maksudnya adalah agar mereka dapat melupakan kebiasaan mereka dan beralih ke lapangan pekerjaan yang tentu menguntungkan mereka misalnya yang ada kaitannya dengan pengembangan industri pariwisata di Thailand, khususnya di daerah pegunungan bagian utara Thailand. Pemerintah pun menjaga kuat tradisi mereka sehingga agar mereka tidak lagi menganut kepercayaan asli mereka yang indigenius, maka pemerintah Thailand mengarahkannya menjadi penganut Budha (*becoming Thai*). Kelompok minoritas sangat dikontrol oleh pemerintah, dalam hal ini mereka tidak diperbolehkan menyeberang ke wilayah perbatasan lainnya. Demikian pula mereka tidak diperbolehkan sampai datang ke ibu kota Bangkok. Oleh karena itu, semua mobil atau bus yang datang dari arah perbatasan menuju arah ibu kota Bangkok, biasanya dicegat polisi untuk memastikan bahwa orang-orang minoritas tidak sampai lolos ke ibu kota. Apabila dalam perjalanan mereka ditangkap oleh polisi mereka pun akhirnya diangkut kembali untuk dipulangkan ke tempat mereka di perbatasan dan tidak diperbolehkan berangkat ke Bangkok. Dari gambaran ini terlihat bahwa kontrol pemerintah Thailand sangat kuat terhadap pergerakan kelompok minoritas di perbatasan Thailand dengan negara lainnya di kawasan itu. Demikian pula halnya dengan

¹⁴ Sjon Hauser, “Travels in the Golden Triangle –avants la letter: Story and Photos”, dalam *Guidelines Chiang Mai, Chiang Rai & the North*, Vol. 11, No. 7, Juli 2004), hal. 44.

¹⁵ Sebagai referensi lihat: Bernhard Dahm, “Der Dekolonisationsprozess und die Entstehung moderner Staaten”, dalam Bernhard Dahm dan Roderich Ptak (eds.), *Sudost Asien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur* (Munche: Verlag CH Beck, 1999), hal. 167. Cf. I Ketut Ardhana, “Introduction: The Significant Issues in the Border Regions between Laos and Thailand”, dalam I Ketut Ardhana, Lamijo, Taufik Abdullah, Mayasuri Presilla, Yekti Maunati (et al.) *Trade Contacts in the Cross Border Areas between Laos and Thailand* (Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences, 2005b).

negara-negara lainnya di Asia Tenggara, Kamboja misalnya menganggap bahwa kehadiran Thailand dan Vietnam di wilayahnya sebagai ancaman, karena di masa lalu negerinya menjadi perebutan pengaruh antara kedua negara itu. Kehadiran Inggris dan Perancis seringkali dianggap sebagai pencegah jatuhnya Kamboja ke bawah kekuasaan Thailand dan Vietnam.¹⁶

Hilltribes atau kelompok etnik minoritas yang tinggal di pegunungan jumlahnya sekitar 60.000 sampai 70.000 orang dan dikenal dengan sebutan Khmer Loeu yang artinya “Khmer atas” (*Upper Khmer*). Mereka ini umumnya tinggal di daerah Timur Laut, seperti provinsi Stung Treng dan Kratie. Dari kelompok ini yang paling banyak dikenal dengan nama Tumpoun. Kelompok minoritas lainnya antara lain adalah Kuy, Phnong Stieng, Pear, Kreung, Kra Chok, Kavet, Brao, Rade, dan Jarai. Seperti kelompok etnik minoritas lainnya, kelompok ini juga melakukan metode *slash-and-burn*, mereka juga berburu dan memancing dan biasanya bertempat tinggal secara berpindah dan jarang tinggal di satu tempat lebih dari empat atau lima tahun. Senada dengan ini kelompok minoritas di berbagai negara memiliki kemiripan pola yakni melakukan *slash-and-burn*.¹⁷

Terdapat kelompok etnik Pearic yang tinggal di wilayah perbatasan antara Thailand di bagian timur laut dan Kamboja yang berjumlah tidak lebih dari 10.000 orang. Kelompok ini biasanya menanam padi dan mereka juga berburu dan mengumpulkan makanan.¹⁸ Muslim Cham, merupakan kelompok etnik lain yang juga tinggal di Kamboja.¹⁹ Masyarakat lokal yang tinggal di perbatasan kebanyakan adalah orang Kamboja yang mempunyai aktifitas perdagangan, bekerja sebagai buruh angkut, pedagang dan sebagainya. Selain itu intensitas pergerakan manusia juga dipengaruhi oleh pergerakan pengungsi yang tidak hanya ke luar negeri tetapi juga seperti terjadi ke perbatasan:

¹⁶ Pengaruh Thailand di Kamboja dapat dikatakan dimulai setelah wafatnya Ang Eng. Putranya yang kemudian diangkat menjadi raja King Ang Duong menggantikannya sebagai penguasa yang dinobatkan di Bangkok tahun 1806. Pada masa kekuasaannya itulah pula ia mengirim upeti ke Vietnam. Upaya-upaya keluarga kerajaan meminta bantuan asing dalam perjuangan melawan anggota keluarga kerajaan lainnya itu, membawa Kamboja secara meningkat di bawah pengaruh Thailand di bagian barat dan Vietnam di bagian timur. Karena bantuan yang diminta meningkat, kemudian datangnya migran dari Vietnam yang menduduki tanah Kamboja. Selanjutnya dengan adanya pemberian upeti ke Thailand dan Vietnam Kamboja banyak dipengaruhi oleh dua kekuasaan negeri itu seperti Battambang, Siemreap, dan Sisophon yang berbatasan dengan Thailand dan Prey Kor, Kampeap Srekantry dan Baria di Delta Mekong. Pertempuran pun tidak terhindarkan antara Thailand dan Vietnam di tanah Kamboja pada pertengahan abad ke-19. Raja King Ang Duong meminta bantuan Perancis untuk mencegah terbaginya Kamboja di bawah kedua pengaruh negeri itu. Lebih lanjut: baca: Tauch Chhuong, *Battambang during the Time of Lord Governor* (terj. Hin Sithan, Carol Mortland dan July Ledgerwood (Honolulu: East West Center, 1994). Baca juga: Michael Freeman, *Cambodia* (London: Reaction Books, 2004).

¹⁷ Michael R. Dove, “Introduction: Traditional Culture and Development in Contemporary Indonesia”, dalam Michael R. Dove (ed.). *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies from Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1988a. Cf. Michael R. Dove, *Sistem Perladangan di Indonesia; Suatu Study Kasus dari Kalimantan Barat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988b).

¹⁸ Orang-orang muslim Kamboja merupakan keturunan orang-orang Cham yang bermigrasi dari Vietnam Tengah setelah penaklukan Kerajaan Champa oleh Vietnam tahun 1471. Selain itu, orang-orang muslim di Phnon Penh termasuk keturunan Pakistan beberapa generasi lalu. Meskipun orang Cham termasuk kelompok minoritas, mereka mempertahankan budaya dan tradisinya, lihat: (*csdy:field(DOCID+kb0065)*).

¹⁹ Mousine (Muhsin), “Minority Right and Pluralistic Society(2006), hal. 4.

Tabel 1:
Pemberangkatan Pengungsi Kamboja 1975 - 1998²⁰

Year	Total Emigration	USA Refugee Admissions	Year	Total Emigration	USA Refugee Admissions
1975	7,261	4,600	1987		1,539
1976	5,251	1,100	1988		2,805
1977	2,970	300	1989		1,916
1978	3,384	1,300	1990		2,166
1979	17,323	6,000	1991		38
1980	27,200	16,000	1992		141
1981	49,731	27,100	1993		22
1982	20,411	20,234	1994		6
1983	29,138	13,115	1995		1
1984	21,706	19,851	1996		0
1985		19,097	1997		0
1986		9,789	1998		108
Total					147,228

Sumber: *US Committee for Refugees; Refugee Reports*

Dari tabel di atas dapat dilihat terdapat jumlah pendatang yang menuju ke perbatasan akibat adanya pengungsian dari wilayah perkotaan menuju ke perbatasan. Hal ini berpengaruh terhadap eksistensi kelompok masyarakat perbatasan yang terutama bertempat tinggal di dataran pegunungan. Meskipun terjadi campuran, namun seringkali identitas mereka sebagai orang Kamboja tidak banyak perbedaan di antara mereka.²¹ Osborne (1999) misalnya mencatat bahwa penduduk Khmer Loeu adalah penduduk pegunungan yang tidak berbeda dengan orang Khmer lainnya di Kamboja.²² Sedikit berbeda dengan Mousise (2006), Osborne (1999:111) memperkirakan jumlah kelompok ini antara 40.000 sampai dengan 100.000 orang. Asal muasal mereka sampai sekarang masih sering diperdebatkan, tetapi ada dugaan bahwa mereka merupakan kelompok penduduk yang berbahasa Mon-Khmer sebagai proses migrasi yang panjang dari kelompok tersebut yang bergerak dari arah barat laut. Kelompok-kelompok masyarakat yang berbahasa Austronesia adalah kelompok etnik Rade dan Jarai yang berasal dari daerah pantai Vietnam dan bergerak ke barat yang membentuk pinggirannya dari kelompok Mon-Khmer.

²⁰ Lihat: http://www.mekong.net/cambodia/ref_stat.htm.

²¹ Hal ini terjadi juga di perbatasan antara Thailand dan Myanmar, sebagai referensi lihat: Yekti Maunati, "Ethnic Groups on the Border between Thailand and Burma: Questions of Identity", dalam *Trade Contacts in the Cross-Border Areas between Thailand and Burma 1900-2002* (Jakarta: Research Center for Regional Resources-LIPI, 2004), hal. 51-75.

²² Milton Osborne, *Southeast Asia: An Illustrated Introductory History* (Allen & Unwin, St. Leonards, 1991), hal. 111.

III. Perbatasan Kalimantan Timur dan Sarawak: Sebuah Pengalaman

Indonesia memiliki garis perbatasan yang cukup panjang yaitu antara Kalimantan Utara-Malaysia: 2.004 km, Nusa Tenggara Timur-Timor Timur: 240 km, Papua-Papua Niugini: 760 km. Permasalahan perbatasan ini hingga kini masih menghadapi beberapa persoalan. Asda upaya untuk mencari pemecahannya melalui *Joint Border Committee*. Berikut akan dibahas bagaimana Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia mempunyai sebuah pengalaman dalam mengatasi permasalahan perbatasannya dengan memfokuskan perhatian di wilayah perbatasan antara kecamatan Kerayan distrik Ba Kelalan yang terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 700m di atas permukaan laut. Wilayah itu dihuni oleh masyarakat lokal yang dikenal Long Dayeh. Kata “long” berarti sungai dan Bawan berarti “nama sebuah sungai”. Versi yang lain tentang arti Bawan adalah nama sebuah tempat. Sampai 20 tahun terakhir mereka mendiami wilayah pedalaman di bagian barat laut dari Kalimantan Timur.²³

Pengetahuan awal tentang sejarah Lun Dayeh sangat terbatas. Harrison sebagaimana juga Crain mencatat bahwa menurut data-data tentang wilayah pedalaman dihuni pada awal abad-abad pertama tahun Masehi yang tampaknya dimulai pada daerah tenggara wilayah itu. Pergerakan orang Lun Dayeh ke Baram, Limbang, dan Bahau dikontrol oleh ekspansi ke arah utara oleh orang Kayan dan orang Kenyah pada abad ke-17. Lembah Lawas Damit dihuni pertama antara tahun 1820 dan 1835. Ceritanya berlanjut tahun 1858 ketika St. John memulai eksplorasinya di Limbang. Ia menyadari bahwa pergerakan orang Lun Dayeh dari Adang telah didesak ke arah timur. Ketika Trusan menjadi bagian negeri pemerintah Sarawak pada tahun 1885, orang Lun Dayeh dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan yang meyakinkan.²⁴

Dari catatan tradisi lisan dikenal secara luas bahwa Long Bawan adalah bagian dari kerajaan Tidung. Akan tetapi kemudian Long Bawan menjadi bagian dari kerajaan Bulungan dengan jumlah penduduk sekitar 60.000 orang Sungai mempunyai peranan sentral, dimana setiap orang di sana dan wilayah sekitarnya mengikuti aliran sungai itu.²⁵ Saat itu disebutkan bahwa orang Lun Dayeh mendiami kecamatan Bulungan,²⁶ namun dewasa ini, wilayah ini menjadi bagian dari kabupaten Nunukan. Penerbangan dengan pesawat udara mulai dipergunakan pada awal tahun 1970-an. Satu-satunya jalan menuju wilayah Mentarang digunakan perahu yaitu dari Sesayap, Mentarang dan sungai Pe. Sungai-sungai ini dikatakan sangat curam, dalam dan berbahaya. Perjalanan biasanya memerlukan waktu antara 6 sampai 10 hari dari pantai. Untuk mencapai desa yang paling dekat dengan daerah Mentarang dibutuhkan dua hari dengan berjalan kaki disertai menyeberang gunung-gunung.²⁷

²³ Marie Peters, *The Lundaya Church of East Kalimantan* (Historical Development of Christian Movement, 1990), hal. 5.

²⁴ Jay B Crain, “The Lun Dayeh”, dalam Victor King (ed.). *World Within The Ethnic Groups of Borneo* (Kuala Lumpur: S. Abdu; Majeed, 1994), hal. 162. Cf. I Ketut Ardhana, “Sharing the Burden among Marginalized People in the Border Areas between East Kalimantan-Indonesia and Sarawak Malaysia”, dalam *Southeast Asia A Global Crossroads*, (SEASREP 10th Anniversary Conference. Chiang Mai-Thailand. 8-9 December 2005a)

²⁵ Lumholtz, Carl. *Through Central Borneo* (Singapore: Oxford University Press, 1991), hal. 51.

²⁶ (*Wujud Arti dan Fungsi Puncak-puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*, 1995/ 1996: 108).

²⁷ Peters, Marie. *The Lundaya Church of East Kalimantan* (Historical Development of Christian Movement), 1990, 5.

Sebelum kedatangan Belanda masyarakatnya hidup dalam kesatuan secara sosial dan budaya. Dari bukti-bukti sejarah, Long Bawan (Indonesia) dikolonisasi oleh Belanda, sementara Ba Kelalan (Sarawak) di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Masyarakat lokal percaya bahwa di kedua wilayah yang berbatasan itu kekuasaan pemerintahan kolonial tidaklah terlalu kuat. Pemerintahan kolonial membagi wilayah itu berdasarkan batas alam misalnya seperti sungai. Sebenarnya di daerah yang berbatasan itu kedua pemerintahan kolonial itu tidak membangun infrastruktur yang baik, dan juga tidak mengupayakan mekanisme keluar masuk wilayah perbatasan seperti penggunaan kartu masuk (*gate card*). Dikatakan pula bahwa masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan tidak membayar pajak kepada pemerintah kolonial. Mereka pun percaya bahwa mereka memiliki lahan perumahan dan pertanian mereka didasari atas hukum adat. Dewasa ini Long Bawan telah mengalami perkembangan dalam kaitannya dengan peraturan otonomi daerah. Pemerintah pusat, kabupaten telah memberikan subsidi kepada masyarakat di Long Bawan dalam kaitannya dengan transportasi udara dari Tarakan ke Long Bawan setiap tahunnya, karena wilayah ini sebelumnya bagian dari Tarakan. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengangkut barang-barang kebutuhan sehari-hari atau “*sembako*” seperti gula, sabun dari Tarakan ke Long Bawan. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa harga-harga barang di Long Bawan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan beberapa daerah Indonesia lainnya yang tidak menghadapi masalah seperti masyarakat Long Bawan.

IV. Konflik di Perbatasan Sarawak-Kalimantan Timur di Era Kolonial

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, tentara Inggris telah memasuki Kalimantan Timur. Ini adalah episode sejarah yang penting karena momentum penting dalam sejarah Indonesia mencapai klimaksnya dengan pendudukan Jepang yang dimulainya perencanaan ke arah kemerdekaan Indonesia.²⁸ Disebutkan bahwa okupasi tentara Jepang tahun 1943-1945 telah membuka “jendela” baru ke daerah dataran tinggi ketika daerah itu dijadikan pusat operasi militer. Tentara Inggris pun mempersiapkan diri menghadapi kedatangan tentara Jepang. Pemerintahan Inggris misalnya secara aktif terlibat dalam operasi di daerah pedalaman Kalimantan. Operasi militer penting ditempatkan antara lain di Kelabit dan dataran tinggi lainnya. Daerah itupun menjadi dasar yang memprovokasi agar tentara Jepang menyerahkan senjatanya dan keseluruhan kekuatannya di seluruh wilayah itu.²⁹ Tentara Jepang pun berusaha menduduki wilayah Ba Kelalan-Sarawak, Sabah, Brunei dan Lawas. Tujuan pendudukan adalah merencanakan untuk menyeberang ke wilayah Kalimantan Timur lainnya. Dengan mempromosikan slogan “Asia untuk Asia” akhirnya tentara Jepang mendarat di Lawas, dan bermaksud menyerang tentara Inggris. Persiapan tentara Inggris dan Belanda dalam menghadapi kedatangan tentara Jepang tidaklah sama. Dalam hal ini Belanda tidak mempersiapkan serangan terhadap Jepang sebaik yang dilakukan oleh tentara Inggris. Untuk mempertahankan dukungan khususnya di kalangan anak muda, pemerintah Inggris mengirim tentara mereka untuk membujuk anak-anak muda melarikan diri dari kota-kota dengan tujuan bahwa tentara Jepang akan kekurangan persediaan bahan makanan. Situasi buruk ini menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan makanan seperti beras dan gula. Di Ba Kelalan, suasananya sangat sepi dan hanya tentara Jepang yang dapat mengendalikan wilayah itu yang menyebabkan larinya tentara Inggris ke Bario. Dari Lawas, tentara Inggris memaksa

²⁸ Taufik Abdullah (ed.). *The Heartbreak of Indonesian Revolution* (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. ix.

²⁹ Poline Bala, *Changing Borders and Identities in the Kelabit Highlands*, *Anthropological Reflections on Growing up in a Kelabit Village Near the International Border*, 2002), hal. 60.

kelompok pemuda Ba Kelalan dan Long Bawan menjadi pendukung tentara Inggris. Sebenarnya beberapa kelompok pemuda menjadi pendukung tentara Inggris. Suasana pun menjadi lebih buruk karena kurangnya persediaan makanan bagi penduduk. Banyak penduduk desa melarikan diri ke hutan-hutan di dataran tinggi. Sementara itu sekelompok tentara Jepang dicatat telah menyerahkan diri dan senjata yang dimilikinya pun disita dan dibakar. Kondisi ini memungkinkan Inggris dapat menguasai keadaan.

Dari Lawas tentara Jepang berjalan dan akhirnya tiba di Long Bawan selama dua tahun. Pada masa pendudukannya masyarakat diharuskan membayar pajak ke *Guncho* dibawah kepala distrik, Andris Singel. Tambahan pula, tentara Jepang membangun sekolah-sekolah di Belawit (*Darat*) dan Baliko (*Tengah*). Para guru didatangkan dari Manado seperti Manis dan Welong. Diceritakan bahwa mereka mengajarkan anak-anak itu selama tiga tahun.³⁰ Ketika tentara Jepang menyerang kelompok pemuda, salah seorang diantaranya terbunuh, yaitu Labo. Ia adalah seorang guru dari sebuah gereja di Ba Kelalan. Tidak seperti Long Bawan, di Ba Kelalan, sebelum kedatangan Jepang, para pemuda telah menyerahkan diri kepada tentara Inggris untuk mendukung pasukan Inggris di Sarawak, Malaysia Timur.³¹ Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Asia Tenggara, pendudukan Jepang di Kalimantan dari tahun 1942 sampai 1945 mempunyai arti yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Perang ini menghasilkan penarikan mundur missie Eropa dari daerah pedalaman, penundaan semua perdagangan dengan daerah-daerah pantai hilangnya nyawa yang terjadi di Limbang dan tempat lain selama penarikan tentara Jepang. Tibanya tentara di pantai barat dan timur terjadi setelah penarikan mundur tentara Jepang. Sampai sekarang tibanya pasukan khusus menjadi ingatan pada masyarakat Lun Dayeh dan menjadi cerita yang turun temurun.³²

Bala (2002) mencatat bahwa masyarakat Kelabit dan Murut (Lun Bawang) berupaya menghentikan penetrasi Jepang di dataran tinggi Kelabit. Kira-kira dua puluh tahun kemudian setelah pendudukan Jepang, wilayah ini menjadi pusat operasi militer yang tidak akan pernah terlupakan oleh masyarakat Kelabit.³³ Kedatangan tentara dengan mempergunakan parasut dipimpin oleh Tom Harrison di Bario, termasuk desa Kelabit pada bulan Februari 1945 ditandai sebagai permulaan peristiwa besar dalam kehidupan masyarakat pegunungan di Lun Dayeh. Kelompok Harrison dapat mengontrol secara administrasi keseluruhan wilayah hunian Lun Dayeh. Kemudian ratusan orang Lun Dayeh berpartisipasi dalam serangan melawan pasukan tentara Jepang. Sisi positif dari munculnya kembali tentara terutama mereka membawa makanan, senjata, barang-barang dagangan, obat-obatan yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat di sana. Crain percaya bahwa akhir dari perang mengarah pada barang-barang yang jumlahnya tidak terbatas. Suasana ini pula mulai memperkenalkan orang pada kehidupan masyarakat Lun Dayeh.³⁴

Seperti dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, ketika hari kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, berita-berita itu jarang terdengar di Malinau karena terbatasnya informasi. Pada saat itu, aspek politik semua bekas-bekas kerajaan termasuk yang di Kalimantan, dilarang untuk bersatu dengan Republik Indonesia yang diproklamasikan.³⁵ Dalam aspek ekonomi, perdagangan skala kecil masih tetap dilakukan dengan Ba Kelalan.

³⁰ Wawancara dengan Melud Palung Oktober 2003

³¹ Wawancara dengan Marison Juli 2006.

³² Jay B Crain, "The Lun Dayeh", dalam Victor King (ed.), *World Within ...*, (1994), hal. 163.

³³ Poline Bala, *Changing Borders and Identities in ...*, (2002), hal. 60.

³⁴ Jay B Crain, "The Lun Dayeh...", (1994), hal. 162.

Namun ketika Jepang dapat dikalahkan tentara Inggris masih berkuasa di Ba Kelalan-Malaysia. Di pihak Indonesia pemerintahan kolonial mulai muncul dalam panggung politik meskipun pengaruhnya dirasakan sangat terbatas. Banyak orang di Ba Kelalan sudah mendiskusikan untuk dapat bebas dan merdeka dari pendudukan tentara Inggris. Meskipun demikian, tentara Inggris menyetujui pendapat akan kemerdekaan. Dengan kata lain, tidak ada perang antara Indonesia dan Malaysia, karena keinginan Malaysia untuk menjadi negara yang merdeka yang didukung oleh kekuasaan kolonial Inggris. Tambahan pula, gereja-gereja memainkan peranan penting dalam mengarahkan masyarakat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan mengikuti dan masuk kepercayaan dan agama mereka yaitu perubahan dari animisme menjadi orang Kristen. Permasalahan agama ini telah meningkatkan hubungan sosial dan budaya antara masyarakat Lun Dayeh di Long Bawan dengan masyarakat Lun Bawan di Ba Kelalan.

Ketika perang berakhir, beberapa kelompok masyarakat yang tinggal di pegunungan meninggalkan wilayah itu menuju ke arah pemukiman pantai, akan tetapi periode yang besar berkaitan dengan masalah migrasi ini di Kalimantan mengikuti ketidakberkembangnya perdagangan selama dan setelah Revolusi Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Banyak hunian Lun Dayeh seperti di Mengalong di Sabah dikatakan berada di situ selama periode itu. Pergerakan manusia yang jumlahnya tidak banyak terjadi pada periode konfrontasi Indonesia-Malaysia (1963-1966) dan gerakan-gerakan seperti itu masih berlangsung sampai sekarang³⁶

Hubungan lintas batas yang semakin meningkat dipertimbangkan sebagai perlawanan “*backdrop*” otonomi daerah di Indonesia. Dari diskusi masa kini dengan pegawai tingkat kecamatan di Long Bawan, ada keinginan yang dinyatakan secara kuat untuk meningkatkan hubungan dengan negara tetangga seperti Sarawak. Kenyataannya telah ada bangunan infrastruktur fisik seperti pembuatan jalan yang menghubungkan distrik di Kalimantan Timur dengan Ba Kelalan di Sarawak. Jaminan otonomi daerah ke tingkat kabupaten-kabupaten telah memberdayakan pegawai dan mendukung pegawai di tingkat daerah untuk peranan aktif dalam merebut kesempatan baru.

V. Komunikasi dan Konfrontasi di Perbatasan

Di masa yang lalu komunikasi selalu menjadi masalah di wilayah perbatasan, karena hanya dapat dilakukan dengan perantaraan pejalan kaki, *handy talky*, namun sekarang hambatan ini sudah dapat diatasi karena sudah terjangkau dengan *handphone voucher* simpati. Penerbangan udara dapat dilakukan melalui pesawat kecil yaitu dari Tarakan ke Nunukan dan akhirnya ke wilayah perbatasan di Long Bawan dan Ba Kelalan.³⁷

Sejarah mencatat bahwa kondisi keamanan di wilayah perbatasan relatif aman sampai tahun 1950-an. Sangat jarang terdengar kalau masyarakat diganggu oleh pencurian dan tindakan kriminal lainnya hingga tahun 1960-an. Tidak mengherankan apabila ada yang

³⁵ Musni Umberan et al. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan* (Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1994), hal. 31.

³⁶ Jay B Crain, “The Lun Dayeh...”, (1994), hal. 164.

³⁷ Bernard Sellato, “Agricultural Practices, Sosial Organization, Settlement Patterns and Ethnogenetic Processes in East Kalimantan, (1995), hal. 2.

mempertimbangkan bahwa situasi yang kondusif ini dianggap sebagai “*paradise period*”. Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan bagaimana pergerakan manusia di perbatasan. Hal ini dapat dilihat pada era kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan khususnya ketika terjadinya konfrontasi dengan Malaysia antara tahun 1963 dan 1967. Hal ini dapat dimengerti karena dalam situasi perang ada kekhawatiran akan karena pergerakan tentara yang masuk ke wilayah perbatasan³⁸

Tambahan pula, bahwa proses di atas menandai titik balik dalam sejarah masyarakat di perbatasan. Jelasnya, ini berlanjut setelah persoalan Irian Barat diselesaikan menjelang bulan Agustus 1962. Kemudian ini tampak dimengerti pula, karena pemerintah Inggris dan Malaya bermaksud membentuk Malaysia, sementara Indonesia memulai kampanye anti Malaysia yang didukung oleh PKI. Kampanye ini juga didukung oleh komunis muda, simpatisan komunis dan sayap kiri yang melarikan diri dari Sarawak ketika munculnya perlawanan Brunei. Selama perlawanan yang muncul di Brunei, terjadi perekrutan tentara yang dikenal dengan *Tentara Nasional Kalimantan Utara* (TNKU) pada tahun 1962.³⁹ Secara resmi, pemerintah Indonesia menyatakan perlawanannya terhadap Malaysia pada 13 Februari 1963 dan mendirikan stasiun radio, *the Voice of Freedom Fighters of Kalimantan Utara*. Hal ini dimaksudkan untuk menyebarkan propaganda anti-Malaysia pada negara “Borneo”. Dihadapi dengan kecendrungan ketegangan di perbatasan dan adanya keterlibatan sukarelawan Indonesia yang mempergunakan senjata yang dibuat oleh tentara-tentara dari *British Special Air Services Regiment*. Pos tentara didirikan di dekat Kuching sebagai akibat perkembangan ini. Konfrontasi tentara mulai dilakukan pada tanggal 12 April ketika “tentara penyelundup” yang berasal dari Kalimantan menyeberang ke stasiun polisi di Tebedu. Selama konfrontasi ini mereka membunuh seorang kopral polisi dan dua orang polisi yang terluka dan merampas senjata yang ada di pos. Tentara Inggris dan helikopter yang dilengkapi dengan 846 *Royal Naval Squadron* dikirim ke Kuching untuk mengupayakan jawaban militer yang cepat di Tebedu. Porritt melaporkan bahwa dokumen CCO (*Captured Clandestine Communists Organization*) memberikan beberapa bukti tentang persiapan komunis untuk mengantisipasi masalah perbatasan (1997:105). Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa “pemerintah telah meminta semua senjata yang tidak terdaftar dan amunisinya pada divisi yang pertama selama perlawanan Brunei. Kehadiran yang tidak teratur tentang kekuatan keamanan mendesak CCO untuk menyerahkan latihannya ke tangan Indonesia, yang pada gilirannya mengarah pada kemunculan pergerakan sayap kiri pemuda Cina ke Kalimantan.⁴⁰ Konflik-konflik itu muncul di daerah perbatasan yang pada saat yang sama ketika masyarakat Brunei bermaksud meraih kemerdekaannya dari kesultanan. Secara bersamaan masyarakat mencari bantuan dari Indonesia di bawah kepemimpinan Yomar yang berasal dari Sasayap yang diikuti oleh 10 orang.⁴¹ Mereka datang ke Indonesia dan membujuk orang Brunei. Beberapa pemuda yang berasal dari Indonesia tampaknya setuju datang ke Brunei. Namun demikian, baik Indonesia dan Malaysia mempertahankan untuk tidak menyerang satu dengan yang lainnya. Melalui kesempatan ini Brunei dapat dibebaskan dari kesultanan dan menjadi sebuah negara merdeka. *Sarawak Gazette* mencatat sebagai berikut:

³⁸ Christina Eghenter, dan Bernard Sellato. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliners di Pedalaman Kalimantan* (Jakarta: The Ford Foundtaion, 1999), hal. 362.

³⁹ Poline Bala, *Changing Borders and Identities...*, (2002), hal. 74.

⁴⁰ Vernon Porritt, *British Colonial Rule in Sarawak 1946-1963* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1997), hal. 105.

⁴¹ Wawancara dengan Melud Palung pada 4 November 2003.

Saravak's Chief Minister says that if further Indonesian armed incursions occurred in Saravak territory, Malaysian Indonesian Security Forces would have no alternative, but to attack and chase these guerrillas into Indonesian territory, but this does not mean that our Security Forces have to attack the Indonesian bases. Two Gurkha soldiers and two Indonesian Border Terrorists killed in Landu district (Saravak Gazette, 1964: 147).

Dalam periode konfrontasi terdapat beberapa konflik yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia. Seperti contohnya konflik yang muncul secara terpisah karena keinginan masyarakat Brunei untuk mewujudkan kemerdekaannya. Mereka menuduh bahwa sepuluh orang dari Brunei telah dilatih secara militer oleh orang Indonesia di Balikpapan untuk dua bulan lamanya. Mereka dilatih di bawah kepemimpinan RPKAD yang kemudian mereka menamakan gerakannya Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU), yang dipimpin Kapten Alex Setiabudi dan wakilnya Letnan Rohadi antara tahun 1963 dan 1964. Para pemuda mendukung RPKAD untuk membebaskan agar kemerdekaan Brunei dapat diraih terutama dari ancaman tentara Gurkha. Setelah melatih mereka kembali ke Brunei dan menginginkan untuk meraih kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Sebaliknya tentara Malaysia meminta bantuan militer dari tentara Inggris. Untuk menghadapi gangguan dari "tentara" Indonesia, Inggris meminta bantuan penuh dari pemimpin-pemimpin tradisional dari daerah pegunungan di wilayah itu. Ini khususnya terjadi dua tahun setelah insiden perlawanan Brunei yang terjadi pada tahun 1964. Saat itu, sejumlah pemuda bekerjasama dengan tentara. Kira-kira 150 pria dari Kelabit dilatih oleh tentara Inggris pada bulan Juli tahun 1964 yang mana latihan pertama mereka berlangsung di Long Arur Buluh Bayuh. Dua unit tentara perbatasan yaitu *the Border Scouts* dan *the Jungle Squad* dibentuk untuk melatih mereka agar dapat menggunakan dinamit, senjata, dan peralatan perang lainnya. Latihan yang sama juga berlangsung di daerah-daerah lainnya yaitu di Long Banga diikuti 80 orang, di Long Akah, dan Lio Matu, dan 80 orang lainnya di Ba Kelalan dan Long Semado

Terdapat beberapa kelompok yang tertarik dalam membantu Brunei dari beberapa ancaman, seperti yang dialami oleh Melud Palung. Ia berasal dari Buduk Tumu memainkan peranan penting dalam masalah keamanan di daerah perbatasan ketika konflik berlangsung. Sebuah organisasi yang disebut *Operasi Pertahanan Rakyat* (OPR) didirikan yang anggotanya dilatih di Long Bawan; dengan pelatihnya yang terdiri dari Suran, Mitun, dan Meru. Tujuannya adalah untuk mendukung perjuangan yang kemudian dikenal dengan gerakan Dwi Kora. Sukarelawan yang berasal dari Indonesia ingin untuk mendukung rakyat Brunei. TNKU yang tujuannya adalah untuk menyatukan Brunei dan Kalimantan Utara dengan slogannya "*Mengganyang Malaysia*". Anggota-anggota organisasi ini percaya bahwa tentara Indonesia, yaitu batalion Tanjung Pura 609 dari Kalimantan Timur tidak dapat mengontrol daerah yang luas yang terkena konflik. Pemimpin-pemimpin organisasi ini adalah Suran, Buas, Tinus, Ruwa Pelipus dan Martin. Berkaitan dengan konfrontasi itu sejumlah desa di daerah perbatasan berpartisipasi. Mereka membantu Indonesia secara ekonomi kalau mereka diminta oleh kepala desanya.⁴²

Konflik muncul di Brian Baru dan Long Bawan tahun 1963 sampai tahun 1965. Bala mencatat bahwa untuk orang lokal ini adalah kesempatan yang jarang untuk belajar memanfaatkan senjata infrantri sebagaimana halnya bekerja bersama dengan tentara yang berasal dari koloni Inggris seperti Australia, Selandia Baru, dan tentara Gurka dari Nepal. Banyak tentara Malaysia yang didukung oleh tentara Gurka datang ke Long Midang dan menyerang post keamanan yang ada di sana. Pada masa itu, masyarakat Ba Kelalan takut dari

⁴² Wawancara dengan Melud Palung Oktober 2003.

“gangguan Indonesia” yang disebut “*Hantu Indonesia*” (*Indonesian ghost*), karena mereka.⁴³ berhasil memasuki perbatasan di Ba Kelalan. Meskipun saat itu dianggap sebagai tahun ketakutan, namun pada saat yang bersamaan juga dianggap sebagai masa petualangan dan saatnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu melawan musuh yang disebut, *Munu*. *Munu* berarti musuh dan secara tradisional ini berarti pembunuh, atau pemburu kepala manusia. Dalam pengertian yang modern, ini berarti gangguan teritorial mereka. Sebagaimana Bala mencatat dari seorang informannya sebagai berikut:

We are not going to war against our people. We went to war against Indonesians. They were people from the island of Java). These Javanese soldiers were known to be brutal and unkind among the locals both in the Bario and Berian areas. For example they killed Balang Nawat, a person from Berian, who was supposedly traveling or visit his relatives in the Bario area, and this caused an uproar among the villagers (Bala 2002: 75).

Lima orang terbunuh pada saat itu. Tentara dari Tanjung Pura membunuh tiga orang. Secara tidak beruntung helikopter Indonesia ditembak oleh tentara Indonesia sendiri dari Manado yang bernama Harsu dan pesawat itu tersungkur di lapangan bandara kecil Yufai pada tahun 1963, yang disebabkan oleh cuaca yang buruk. Sampai sekarang bangkai pesawat ini masih dapat dilihat di Long Bawan. Rakyat Long Midang di daerah perbatasan pun dievakuasi ke Long Bawan. Selama periode ini banyak orang tua ditangkap oleh tentara Gurka di pos militer di Long Pasiah. Mereka pun dituduh sebagai *spionase*. Salah seorang dari mereka adalah Sumbi yang ditangkap di Long Semado dan kemudian dibawa ke Balikpapan. Yang lainnya seperti Tilo ditangkap di Miri berkaitan dengan alasan *spionase* juga. Sejumlah pemuda dilaporkan juga menyerahkan diri karena kurangnya persediaan makanan.

Sarawak Gazette mengatakan:

An Indonesia guerrilla, Mohammed bin Seman Noto Kemin of Sungai Raya, Indonesian Borneo who surrendered himself to villagers in Kampong Padanum in Bau district on March 14 this year is sentenced to 10 years imprisonment by the Kuching High Court Judge for being in unlawful possession of a sten-gun, 21 round of ammunition and two hand grenades (Sarawak Gazette 1964: 147).

Menjelang perayaan hari kemerdekaan Malaysia, 33 gangguan menyebar di seluruh perbatasan Sarawak dengan Kalimantan, telah dicatat di *the Security Forces Incident Log*, yang melibatkan 10 pimpinannya. Tujuh batalion kekuatan keamanan ditempatkan untuk mempertahankan 1600 kilometer perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan Utara berkaitan dengan masalah gangguan itu. Tambahan pula, untuk mengupayakan peringatan dini tentang gangguan itu, *Border Scouts* direkrut pada tanggal 20 Mei. Situasi ini berlangsung cukup lama sampai akhirnya sampai akhirnya berlangsung *Bangkok Accord of 1966*.⁴⁴ Karena situasi yang tidak aman, dapat dimengerti bahwa pada saat itu tidak ada hubungan perdagangan yang efektif antara masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Terlebih-lebih dengan dikontrolnya perbatasan secara lebih keras melalui pos militer sepanjang Ba Kelalan dan Lawas (dengan jarak sekitar 140 km dari Long Bawan). Sementara itu, lapangan udara yang dibangun tahun 1960-an juga mengalami kerusakan. Itu salah satu alasan mengapa pemerintah Sarawak mengizinkan untuk melanjutkan pembangunan airport dari Miri-Lawas dan Ba Kelalan.

⁴³ Poline Bala, *Changing Borders and Identities...* (2002), hal. 74-75.

⁴⁴ Vernon Porritt, *British Colonial Rule in*, (1997), hal. 110.

Pada tahun 1970 pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintahan daerah merencanakan beberapa program yang salah satunya adalah program pemukiman kembali penduduk yang dikenal dengan *Resettlement Penduduk* (RESPEN) dengan maksud mengontrol terjadinya pergerakan manusia di wilayah perbatasan. Program itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan ekonomi pedalaman sehingga masyarakat memiliki tradisi untuk hidup menetap di satu tempat yang telah dilakukannya. Karena alasan transportasi, harga minyak, garam menjadi lebih mahal di dataran tinggi daripada di dataran rendah. Tujuan yang lainnya adalah untuk mengidentifikasi sejumlah daerah hunian yang baru untuk pendatang dari daerah pedalaman ke dataran rendah dan mengupayakan bantuan pembangunan dari masyarakat di kawasan itu. Kebijakan pemerintah semacam itu telah dilakukan oleh pemerintahan kecamatan untuk melarang masyarakat dari pergerakan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lainnya

Namun demikian, kontak-kontak diantara mereka dalam skala kecil masih berlangsung sehubungan dengan kepentingan ekonomi sampai tahun 1980-an. Kesulitan untuk menemukan garam, tembakau, minyak menjadi alasan dibalik pergerakan perdagangan itu. Tambahan pula, bahwa tidak ada akses secara resmi bagi mereka untuk menjual barang produksi lokal mereka. Sementara akses yang sulit dapat dijumpai di pedalaman Kalimantan meskipun ada sungai tetapi ini jarang dilakukan karena sangat curam. Kondisi alam yang sangat terpencil dan sulit dijangkau menjadi kendala utama mengapa barang-barang berupa produksi pertanian sulit diperdagangkan. Oleh karena itu, terjadi ketergantungan dengan masyarakat perbatasan di wilayah Sarawak Malaysia. Lebih-lebih pula produksi pertanian yang sangat terbatas juga.⁴⁵ Karena kurangnya pengobatan medis dan kesempatan yang lebih baik, situasi ini menjadi faktor penting mengapa pemuda di pedalaman atau dataran tinggi di wilayah perbatasan meninggalkan wilayah mereka pergi ke kota-kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.⁴⁶

VI. Penutup

Masyarakat yang menghuni wilayah perbatasan di Kecamatan Krayan (Kalimantan Timur, Indonesia) dan distrik Ba Kelalan (Sarawak, Malaysia) berasal dari etnik yang sama dilandasi dengan kehidupan yang berlatar belakang tradisi dan kebudayaan yang sama. Dalam catatan sejarah, kedua etnik yang di wilayah Indonesia dikenal dengan “Lun Dayeh” dan di wilayah Sarawak disebut “Lun Bawan“, hidup dalam suasana harmonis, kerjasama sebagaimana dalam kehidupan masyarakat tradisional lainnya. Titik klimaks, dengan keterpisahan yang terjadi adalah sebagai akibat munculnya negara modern, ketika masing-masing pihak menyatakan sebagai negara merdeka (Indonesia dan Malaysia). Politik kenegaraan ini menyentuh tingkat lokal di wilayah perbatasan yang menyebabkan mereka diharuskan memilih menjadi warga negara Malaysia atau Indonesia. Secara geografis, letak wilayah masyarakat Lun Dayeh terisolasi dengan wilayah masyarakat Indonesia lainnya dengan dikelilingi gunung dan akses jalan masuk yang belum dibuat ke wilayah ini. Isolasi secara geografis dengan masyarakat lain diikuti dengan pilihan kewarganegaraan membuat perbedaan secara politik di antara kedua wilayah itu, meskipun secara sosial budaya mereka

⁴⁵ Christine Padoch, “A Study of a Bornean System of Intensive Agriculture as a Model for Development. Institute for Environmental Studies (University of Wisconsin, 1981), hal. 25.

⁴⁶ Christina Eghenter dan Bernard Sellato. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam:*, (1999), hal. 362-365.

masih terintegrasi secara kuat misalnya, tidak jarang orang yang disebut “Lun Dayeh“ itu memiliki lahan tanah garapan mereka di masyarakat “Lun Bawan“ di Malaysia atau sebaliknya.

Meskipun secara sosial budaya mereka tampak tidak mempunyai masalah, namun dinamika ekonomi di kawasan regional memberi dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Lun Dayeh itu. Berbeda halnya dengan dinamika historis yang cukup panjang ketika wilayah bagian perbatasan Malaysia dibawah kekuasaan Inggris, dan wilayah perbatasan Indonesia dibawah kekuasaan Belanda, tampak tidak terjadi sentuhan pengaruh politik, ekonomi yang intensif di wilayah itu. Pada saat itu, peran pemerintah pusat terasa mendominasi, namun dalam negara modern yang mengalami proses globalisasi ini semakin dirasakan peranan wilayah yang terpinggirkan seperti wilayah perbatasan ini. Tidak hanya dalam arti sosial ekonomi, tetapi masalah peningkatan wilayah perbatasan dalam konteks pertahanan dan keamanan. Sejak tahun 2005 terjadi peningkatan jumlah petugas perbatasan dari satu kompi menjadi satu batalion yang terdiri dari 85 orang. Ini menunjukkan betapa sekarang ini perhatian terhadap wilayah perbatasan sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat dari kedua negara.

Wilayah yang dihuni oleh masyarakat Lun Dayeh sebenarnya tidak terlepas dari konteks politik lingkungan yang global yang menyatakan wilayah itu sebagai *World Heritage* atau dianggap sebagai “paru-paru” dunia yang harus diproteksi dari berbagai pengaruh perusakan hutan atau flora dan faunanya. Akan tetapi, masih belum dilihat secara jelas identitas atau status yang menempati wilayah Lun Bawan-Krayan yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Taman Nasional Kerayan Mentarang (TNMK) dibawah perlindungan WWF (*World Wild Fund*) itu. Inilah persoalan yang perlu direvisi dan dielaborasi, karena keberadaan mereka hidup beratus tahun, yang jauh lebih lama dari keberadaan WWF di wilayah itu. Karena kondisi geografis yang demikian itu, menyebabkan terutama setelah pilihan kewarganegaraan, mereka menjadi lebih terisolasi (“*land locked country*“), yang menciptakan kondisi ketergantungan antara masyarakat Lun Bawan yang berbatasan dengan Ba-Kelalan (Sarawak – Malaysia) dan antara masyarakat Lun Bawan yang berbatasan dengan Sabah-Malaysia.⁴⁷

Di satu pihak masyarakat Lun Bawan di Sarawak memiliki sarana dan prasarana pembangunan yang memadai dengan sudah dibangun akses jalan ke perbatasan lebih baik mulai dari Miri – Lawas dan akhirnya ke Ba Kelalan. Dalam kondisi seperti ini mereka mempunyai keuntungan adanya akses jalan mobil langsung yang dapat mengangkut barang ke wilayah perbatasan, meskipun sentra-nya di Lawas. Pedagang-pedagang Ba Kelalan mengambil barang kebutuhan pokok yang dijual lagi diambil di Lawas. Di pihak lainnya masyarakat Lun Dayeh di Long Bawan tidak memiliki wilayah geografis sebaik orang Lun Bawan di Serawak Malaysia, mereka sangat tergantung dengan pengiriman barang dari Tarakan dan Nunukan, sehingga harga-harga barang menjadi mahal sampai di Lun Bawan yang diangkut dengan pesawat dalam jumlah yang terbatas, oleh karena itu mereka cenderung mengambil barang dagangan di Ba Kalalan walaupun pada mulanya melalui hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka. Bagi masyarakat Lun Dayeh ini tentu tidak menguntungkan. Namun bagi masyarakat Lun Bawan ini adalah kesempatan untuk mencari

⁴⁷ Sebagai referensi tentang Sabah, baca: Riwanto Tirtosudarmo, “Economic Crisis, Regional Autonomy and Emerging Issues at the Borderland of East Kalimantan and Sabah”, Makalah dipresentasikan pada *the 7th Borneo Research Council Conference*, Kota Kinabalu, Sabah, 15-18 July 2002.

keuntungan. Itulah sebabnya "gate" sering ditutup, kalau mereka ingin menaikkan harga barang tidak jarang mereka merusak jembatan yang sering dilalui oleh pedagang "Lun Dayeh" yang mengambil barang ke Lawas. Akan tetapi, tampaknya belum ada kerjasama diantara masyarakat Lun Bawan di perbatasan sehingga tidak membolehkan mereka mengambil barang di Lawas. Akibatnya ada keterbatasan di kalangan Lun Dayeh. Maka perlu diadakan MoU berkaitan dengan persoalan perbatasan antara dua masyarakat yang masih terbelenggu itu. Adanya proses globalisasi yang cepat, tampaknya menciptakan konflik yang berkepanjangan terhadap dua etnis yang hidupnya berdampingan di perbatasan itu. Oleh karena itu, peran negara dalam memecahkan persoalan ini menjadi penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed.). *The Heartbreak of Indonesian Revolution*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Anderson, Benedict. *Imagine Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Edisi Kedua. London: Verso, 1983.
- Ardhana, I Ketut. "Some Notes on Border Issues between Thailand and Burma", dalam I Ketut Ardhana, Lamijo, Yekti Maunati, Rucianawati (et al.). *Trade Contacts in the Cross-Border Areas between Thailand and Burma 1900-2002*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences, 2004a.
- Ardhana, I Ketut, Jayl Langub dan Daniel Chew, *Border of Ethnicity and Kinship: Cross Border Relations between the Kelalan Valley Sarawak and te Bawan Valley, East Kalimantan*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences, 2004b.
- Ardhana, I Ketut, Jayl Langub dan Daniel Chew. "Border of Kinship and Ethnicity: Cross-Border Relations between the Kelalan Valley, Sarawak, and the Bawa Valley, East Kalimantan", dalam *Borneo Research Bulletin*, Vol. 35. Helsinki-Finlandia: University of Helsinki, 2004c.
- Ardhana, I Ketut. "Sharing the Burden among Marginalized People in the Border Areas between East Kalimantan-Indonesia and Sarawak Malaysia", dalam *Southeast Asia A Global Crossroads*, SEASREP 10th Anniversary Conference. Chiang Mai-Thailand. 8-9 December 2005a
- Ardhana, I Ketut. "Introduction: The Significant Issues in the Border Regions between Laos and Thailand", dalam I Ketut Ardhana, Lamijo, Taufik Abdullah, Mayasuri Presilla, Yekti Maunati (et al.) *Trade Contacts in the Cross Border Areas between Laos and Thailand*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-the Indonesian Institute of Sciences, 2005b.
- Ardhana, I Ketut. "Politik dan Strategi Perbatasan", dalam *Komunika (Warta Ilmiah Populer Komunikasi dalam Pembangunan)*, Vol. 9, No. 1. Jakarta: LIPI Press, 2006.
- Bala, Poline. *Changing Borders and Identities in the Kelabit Highlands*, Anthropological Reflections on Growing up in a Kelabit Village Near the International Border, 2002.
- cstdy:field(DOCID+kh0065).
- Chandler, David. *A History of Cambodia: Politics, War and Revolution Since 1945*. Bangkok: Silkworm Books, 2003.
- Chhuong, Tauch. *Battambang during the Time of Lord Governor* (terj. Hin Sithan, Carol Mortland dan July Ledgerwood (Honolulu: East West Center, 1994).

Chutintaranond, Sunait dan Kanokphan U-sha, *From Fact to Fiction: History of Thai – Myanmar Relations in Cultural Context: Historical Conference*. Bangkok: Institute of Asian Studies & Faculty of Arts Chulalongkorn University, April 2001.

Crain, Jay B. “The Lun Dayeh”, dalam Victor King (ed.). *World Within The Ethnic Groups of Borneo*. Kuala Lumpur: S. Abdu; Majeed, 1994.

_____. “Constructing the Lun Dayeh: Contradictions Past and Present”, dalam Michael Leigh (ed.). *Borneo 2000: Proceedings of the Sixth Biennial Borneo Research Conference*. Kuching-Sarawak: 2000.

Dahm, Bernhard. “Der Dekolonisationsprozess und die Entstehung moderner Staaten”, dalam Bernhard Dahm dan Roderich Ptak (eds.). *Sudost Asien Handbuch: Geschichte, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur*. Munchen: Verlag CH Beck, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kalimantan Timur. *Wujud, Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli di Kalimantan Timur*, 1995/ 1996.

Dewan Presidium. *Keputusan Musyawarah Besar II Ikatan Dayak Sa’baen di Tanglaan- Tgl. 28 Nop. 01 Des. 2002*.

Dove, Michael R. “Introduction: Traditional Culture and Development in Contemporary Indonesia”, dalam Michael R. Dove (ed.). *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies from Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1988a.

Dove, Michael R., *Sistem Perladangan di Indonesia; Suatu Study Kasus dari Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988b.

Eghenter, Christina. *Knowledge, Action, and Planning: A Study of Long-distance Migrations among the Kayan and Kenyah of East Kalimantan, Indonesia*. Ph.D. Dissertation. Rutgers University, 1995.

Eghenter, Christina dan Bernard Sellato. *Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan*. Jakarta: The Ford Foundtaion, 1999.

Evans, Grant., Christopher Hutton dan Kuah Khun Eng (eds.), *Where China Meets Southeast Asia: Social & Cultural Change in the Border Regions*. Singapore-Bangkok: White Lotus and Institute of Southeast Asian Studies, 2000.

Forum Musyawarah Masyarakat Adat Hilir, *Himpunan Hukum Adat Masyarakat Hilir*, 2001.

Freeman, Michael. *Cambodia*. London: Reaction Books, 2004.

Geddes, W. R. *The Land Dayaks of Sarawak*. A Report on a Sosial Economic Survey of the Land Dayaks of Sarawak presented to the Colonial Sosial Science Research Council, 1954.

http://www.mekong.net/cambodia/ref_stat.htm.

Haba, John. "Ethnic Groups, Development and Potential Conflict: Case Study in Nunukan's District", dalam *BRC Conference 2002*. Kinabalu, 15-18 Juli 2002.

Hauser, Sjon. "Travels in the Golden Triangle –avants la letter: Story and photos, dalam *Guidelines Chiang Mai, Chiang Rai & the North*, Vol. 11, No. 7, Juli 2004.

Himpunan Hukum Adat Masyarakat Krayan Hilir. Long Umung: Forum Musyawarah Masyarakat Adat Krayan Hilir, 2001.

Jacobs, Sheldon A. *Myanmar: Trade and Investment in Asia (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: Studies in Trade and Investment)*. New York: the United Nations, 1996.

Keputusan Musyawarah Besar II Ikatan Besar II Ikatan Dayak Sa'baen di Tanglaan-Krayan Tgl. 28 Nop. 01 Des. 2002.

King, Victor T. *The Peoples of Borneo*. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1993.

Lumholtz, Carl. *Through Central Borneo*. Singapore: Oxford University Press, 1991.

Magenda, Burhan. *East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy*. New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1991.

Maunati, Yekti. *Contesting Dayak Identity: Commodification and the Cultural Politics of Identity in East Kalimantan*. Ph.D. Dissertation, Latrobe University, Melbourne, Australia, 2000.

Maunati, Yekti. "Ethnic Groups on the Border between Thailand and Burma: Questions of Identity", dalam *Trade Contacts in the Cross-Border Areas between Thailand and Burma 1900-2002*. Jakarta: Research Center for Regional Resources-LIPI, 2004.

Mousine (Muhsin), "Minority Right and Pluralistic Society (the Cambodia Experiences)", dalam the International Conference of Islamic Scholar "Upholding Islam as Rahmatan Lil Alamin toward Justice and Peace", Jakarta Indonesia, 20-22 June, 2006.

Osborne, Milton. *Southeast Asia: An Illustrated Introductory History*. Allen & Unwin, St. Leonards, 1991.

Padoch, Christine. "A Study of a Bornean System of Intensive Agriculture as a Model for Development. Institute for Environmental Studies University of Wisconsin, 1981.

_____ "Agriculture in Interior Borneo: Shifting Cultivation and Alternatives", dalam *Expedition*, Vol. 30.No. 1.

Peters, Marie. *The Lundaya Church of East Kalimantan*. (Historical Development of Christian Movement), 1990.

Porrirt, Vernon. *British Colonial Rule in Sarawak 1946-1963*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1997.

Purwani Williams, Chatarina. "Religion as Social Infrastructure in Transnational Migration of Eastern Indonesian Domestic Workers", dalam *Southeast Asia A Global Crossroads* (SEASREP 10th Anniversary Conference 8-9 December 2005. Chiang Mai-Thailand.

Sarawak Gazette, No. 1276. Kuching, June 30th, 1964.

Sellato, Bernard. *Nomads of the Borneo Rainforest: The Economics, Politics, and Ideology of Settling Down*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

_____. "Agricultural Practices, Sosial Organization, Settlement Patterns and Ethnogenetic Processes in East Kalimantan, 1995.

_____. *Innermost Borneo: Studies in Dayak Cultuyres*. Singapore: Singapore University Press, 2002.

Staf Proyek Konservasi Kayan Mentarang untuk Studi Zonasi Lokasi Kayan Mentarang, *Kondisi Alam dan Keadaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Kayan Mentarang Kalimantan Timur*. WWF Indonesia Programme PHPA LIPI, December 1993.

Tagliacozzo, Eric. "Border Permeability and the State in Southeast Asia: Contraband and Regional Security", dalam *Contemporary Southeast Asia*, Volume 23, No. 2, August 2001.

Tasker, Rodney. "The Borders of Suspicion", dalam *The Far Eastern Economic Review*, Oktober 1982.

Tirtosudarmo, Riwanto. "Economic Crisis, Regional Autonomy and Emerging Issues at the Borderland of East Kalimantan and Sabah", Makalah dipresentasikan pada *the 7th Borneo Research Council Conference*, Kota Kinabalu, Sabah, 15-18 July 2002.

Toyota, Mika. "Who are the 'illegal migrants' at the Thai-Myanmar border?", dalam *2nd SEASREP Workshop on Borders and Borderlands in Southeast Asia, 25-26 March 2004*, Jakarta-Indonesia

Umberan, Musni et al. *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1994.

Wang, Xiuli. "'Kokang in the Myanmar-China Borderland", dalam *Southeast Asia A Global Crossroads*, SEASREP 10th Anniversary Conference 8-9 December 2005. Chiang Mai-Thailand.

Wilson, Constance M. dan Lucien M. Hanks, "Thai-Shan Diplomacy in the 1840's", dalam *The Burma-Thailand Frontier over Sixteenth Decades: Three Descriptive*

Documents. Athens & Ohio: Center for International Studies, Monograph in International Studies Southeast Asia series, No. 70, 1985.